

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara dan masyarakat sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengalami suatu perubahan sosial. Ketika bangsa kita mengalami berbagai perubahan sosial sebagai akibat dari aneka krisis yang menimpa (krisis moneter, krisis politik, krisis kepercayaan, dan lain-lain) tampaknya semua karakter sosial yang melekat dalam diri kita dan pernah diagung-agungkan itu, mulai berangsur-angsur hilang dan bahkan kita mulai menampakkan karakter sosial yang bengis dan menakutkan. Hal itu nampak paling transparan dalam bentuk tindakan-tindakan yang destruktif yang dilakukan kita manusia terhadap sesama yang ada di sekitar kita seperti, benturan, konflik, kekerasan, pembunuhan, pembakaran, penjarahan, pemerkosaan, penculikan, terorisme, dan lain-lain. Tindakan-tindakan destruktif seperti itu tentu akan mengacak-ngacak modal sosial (social capital) yang telah kita miliki.

Otonomi Daerah yang kehadirannya dimungkinkan untuk dapat memupuk modal sosial, belum berperan banyak untuk menumbuhkan rasa solidaritas, kejujuran, keadilan, kerjasama, dan sebagainya. Karena itu, sekarang harus ada upaya untuk menumbuhkembangkan lagi modal sosial yang semakin menipis ini dalam institusi lokal yang merupakan cikal bakal terbentuknya insitusi global.

Konflik di Indonesia sudah merupakan kejadian yang sangat sering terjadi. Konflik tidak hanya terjadi dalam keluarga sebagai pribadi, melainkan sudah

merebak pada tingkatan nasional. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi yang terkait dengan ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Letjen (Pur) Kiki Syanakri di harian Umum Suara Pembaharuan menggambarkan bahwa sumber konflik di Indonesia setidaknya terdiri dari lima faktor, yaitu: ideologi/agama, politik, ekonomi, antar-etnis, dan separatisme (Syanakri, 2004). Dari inventarisasi Panitia Pengawas Pemilu, setidaknya terdapat tujuh daerah yang rawan konflik di Indonesia. Di antaranya adalah kawasan Pantura, daerah "Tapal Kuda" di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kota Surakarta (Jawa Tengah), Kalimantan, Jawa Timur, dan Jakarta (Amin, 2004). Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang dipetakan sebagai daerah yang memiliki konflik tersebut, terutama konflik politik dan ekonomi. Dan salah satu wilayah di Jawa Timur diujung Timur yang dikenal sebagai daerah yang rawan konflik adalah Banyuwangi. Daerah ini merupakan pertemuan tiga budaya yaitu Jawa, Madura, dan Osing. Seperti yang kita ketahui, salah satu konflik besar yang terjadi antara lain adanya konflik Pilkada (Pemilihan Wakil Daerah). Konflik

dapat terjadi dalam kelompok untuk memperebutkan hal yang sama. Dalam setiap situasi konflik juga selalu akan mencapai sebuah tujuan.

Adapun yang memicu atau memperbesar konflik ini adalah faktor maturitas elit politik yang rendah dan cenderung hanya mementingkan kepentingan ekonomi politiknya. Begitu banyak pihak-pihak yang berkonflik pada akhirnya, dan arena tidak dapat menerima kealahannya konflik pun kemudian semakin menyebar. Maka secara langsung, konflik yang ada dan berkepanjangan itu akan terbawa hingga ke tingkat jajaran pemerintahan daerah, sehingga kinerja terpengaruh. Yang mana pada akhirnya proses pembangunan pun menjadi terhambat.

Secara teoritis sumber kekuasaan yang terbatas akan terus menjadi rebutan, walaupun memerlukan banyak biaya dan secara jelas akan memunculkan konflik. Kekuasaan menjadi perhatian utama para kaum elit politik. Persoalan seperti ini seringkali menjadi wacana politik lokal yang jauh dari rasionalitas politik demokratis khususnya di Banyuwangi. Penyelenggaraan Pilkada tentu saja merupakan aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan. Seluruh partai memiliki kepentingan, begitu pun individu kandidat yang hendak bertarung. Mereka akan mengoptimalkan seluruh kekuatan termasuk kekuatan dari para pendukungnya masing-masing. Kenyataan di beberapa Pilkada yang sudah terselenggara banyak yang tidak melahirkan legitimasi. Hasil yang ditetapkan tidak memiliki wibawa sebagai hasil yang sah, sehingga muncul gelombang penentangan dari berbagai pihak, terutama dari pendukung calon yang kalah. Di banyak tempat, Pilkada juga tidak memiliki sistem pengorganisasian perundingan. Rentetan kasus dalam penyelenggaraan Pilkada

yang berujung konflik bisa jadi memperlemah *political performance*. Terutama, jika konflik tak bisa dikelola secara baik oleh pihak-pihak yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Pilkada. Antusiasme masyarakat menyaksikan Pilkada, bisa dipahami terutama dalam konteks sosio-politis dan psiko-politis masyarakat.

Secara sosio-politis, Pilkada merupakan momen historis bagi Bangsa Indonesia, dimana para kepala daerah dipilih secara langsung. Ini merupakan hajatan baru yang akan menentukan nasib penanganan daerah-daerah dimasa mendatang. Model birokrasi daerah yang selama ini elitis dan menutup akses dari partisipasi rakyat, mau tidak mau harus tunduk pada kedaulatan rakyat. Peran besar yang diberikan kepada rakyat untuk menentukan kepala daerah mereka masing-masing inilah yang menciptakan atmosfir kesemarak.

Yang tidak kalah pentingnya, dalam hal ini juga perlu di ketahui bahwa konflik apapun terkait dengan penyelesaiannya tidak bisa lepas dari adanya modal sosial. Modal sosial ini merupakan energi pemberdayaan masyarakat yang sangat dahsyat. Masing-masing memiliki konfigurasi nilai dan norma yang sangat menentukan besarnya tingkat kerekatan dan kolaborasi sosial dalam masyarakat. Dimensi ini akan berpengaruh kuat pada karakteristik perilaku masyarakat dan respon yang mereka tunjukkan terhadap setiap kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah.

Apapun rencana dan proyek yang dirancang akan senantiasa berhadapan dengan faktor-faktor tersebut. Faktor tersebut dapat memperlancar atau bahkan menggerogoti pemberdayaan itu sendiri. Di sini peran modal sosial yang sangat menentukan. Modal sosial merupakan kekuatan yang mampu membangun civil

community yang dapat meningkatkan pembangunan partisipatif, dengan demikian basis modal sosial adalah trust, ideologi dan religi. Pemberdayaan masyarakat akan mengalami kegagalan tanpa menyadari pentingnya melibatkan dimensi kultural dan mendayagunakan peran modal sosial yang tumbuh di tengah masyarakat dalam mempercepat dan mengoptimalkan hasil dari proses pemberdayaan itu sendiri.

Berbicara konflik dalam penyelenggaraan Pilkada, tentunya sangat kompleks. Anggapan sebagian besar orang bahwa konflik selalu akan melahirkan yang namanya kehancuran dan kekacauan tidak sepenuhnya benar. Jika ada sisi negatif maka juga ada sisi positifnya. Konflik politik jangan selalu dimaknai sebagai kegagalan demokrasi yang berakibat kekacauan, tapi sejatinya konflik harus dimaknai sebagai suatu proses pembelajaran politik bagi masyarakat. Konflik itu sesuatu yang melekat pada diri masyarakat. Setiap upaya mengelola konflik perlu memahami dan menyadari manusia itu hidup bersamaan dengan konflik. Konflik tidak dapat dihilangkan, hanya dapat ditekan atau dieliminir sehingga tidak menjadi tindak kekerasan.

Penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan modal sosial dan penyelesaian konflik politik di masyarakat Banyuwangi. Dipilihnya Banyuwangi sebagai lokasi penelitian karena di wilayah ini sudah membuktikan kecilnya konflik politik yang berakibat anarkisme walaupun potensi untuk terjadinya konflik horizontal sangat terbuka lebar.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini akan mengkaji masalah modal sosial dan penyelesaian konflik politik di masyarakat Banyuwangi, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pola konflik politik di masyarakat Banyuwangi?
- 2) Bagaimanakah pola penyelesaian konflik politik masyarakat Banyuwangi?
- 3) Modal sosial apakah yang menjadi model penyelesaian konflik politik di Banyuwangi?
- 4) Bagaimanakah modal sosial yang ada dikembangkan dan disosialisasikan ke dalam masyarakat Banyuwangi?

1.3. Signifikansi dan Keunikan Penelitian.

Ada banyak penelitian yang berkaitan dengan modal sosial dalam penyelesaian konflik, namun lebih banyak berfokus pada permasalahan sosial seperti, etnis, agama dan SARA.

Berbeda dengan penelitian yang sebelumnya bahwa pendekatan modal sosial dapat digunakan sebagai alternatif solusi sebagai perekat sosial dalam upaya menyelesaikan konflik sosial, maka pada penelitian ini memiliki beberapa pertimbangan yang membuat peneliti merasa perlu melakukan penelitian ini.

Adapun pertimbangan adalah:

- 1) Penelitian ini difokuskan pada permasalahan konflik politik.
- 2) Dilihat dari segi sejarah perpolitikannya, kasus-kasus konflik politik di

Banyuwangi cukup tinggi.

- 3) Banyuwangi dipetakan sebagai daerah yang rawan konflik.
- 4) Banyak potensi konflik, namun yang sempat muncul tidak sampai menimbulkan anarkisme yang berlebihan.

1.4. Tujuan Penelitian

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dijabarkan pada fokus penelitian, yaitu:

- 1) Bagaimanakah pola konflik politik di masyarakat Banyuwangi?
- 2) Bagaimanakah pola penyelesaian konflik politik masyarakat Banyuwangi?
- 3) Modal sosial apakah yang menjadi model penyelesaian konflik politik di Banyuwangi?
- 4) Bagaimanakah modal sosial yang ada dikembangkan dan disosialisasikan ke dalam masyarakat Banyuwangi?

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan manfaat untuk:

1. Secara praktis, untuk penanganan masalah konflik politik dan mengidentifikasi modal-modal sosial yang ada di masyarakat Banyuwangi dan diharapkan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik politik yang terjadi di Banyuwangi.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang psikologi dalam upaya pengembangan model

penyelesaian konflik politik di masyarakat khususnya di masyarakat Banyuwangi dan Jawa Timur pada umumnya dengan mendasarkan pada modal sosial yang ada.